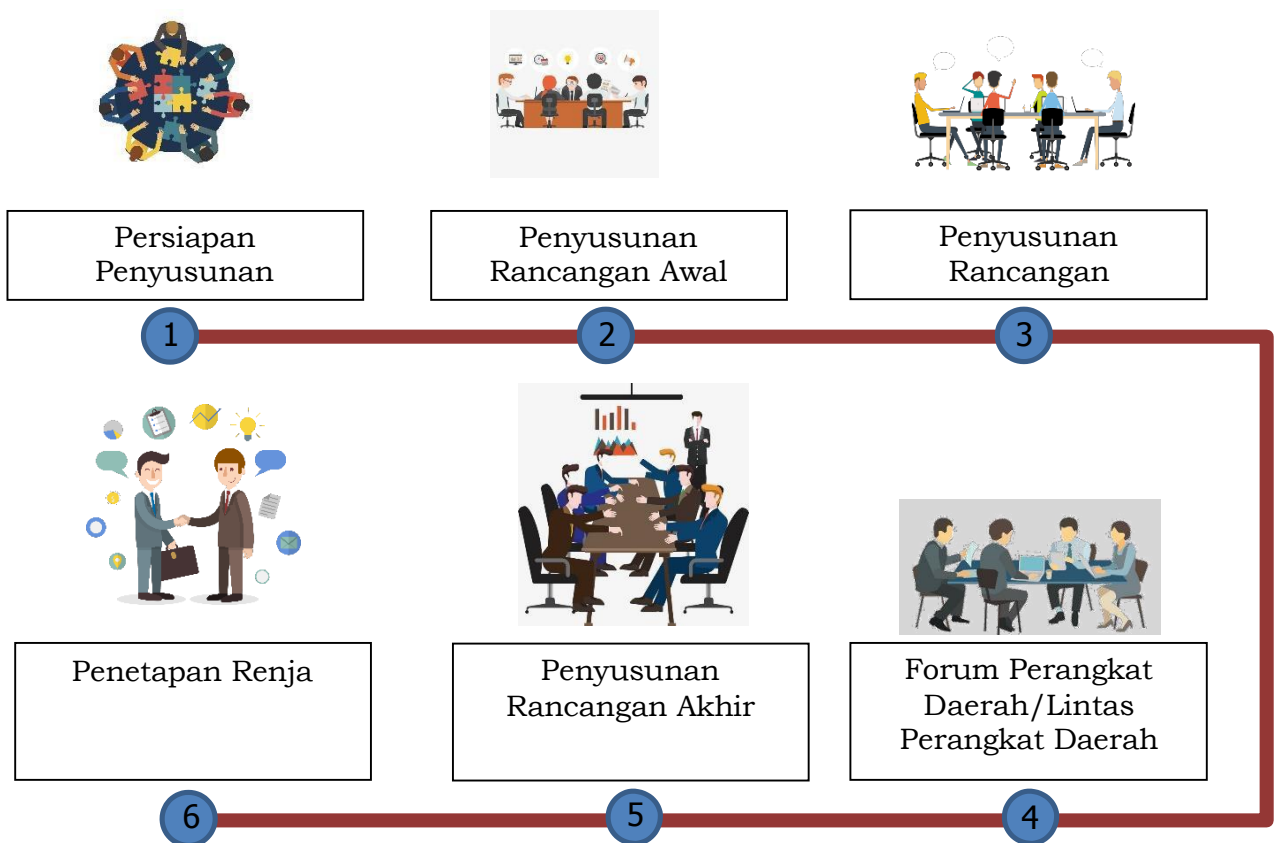


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

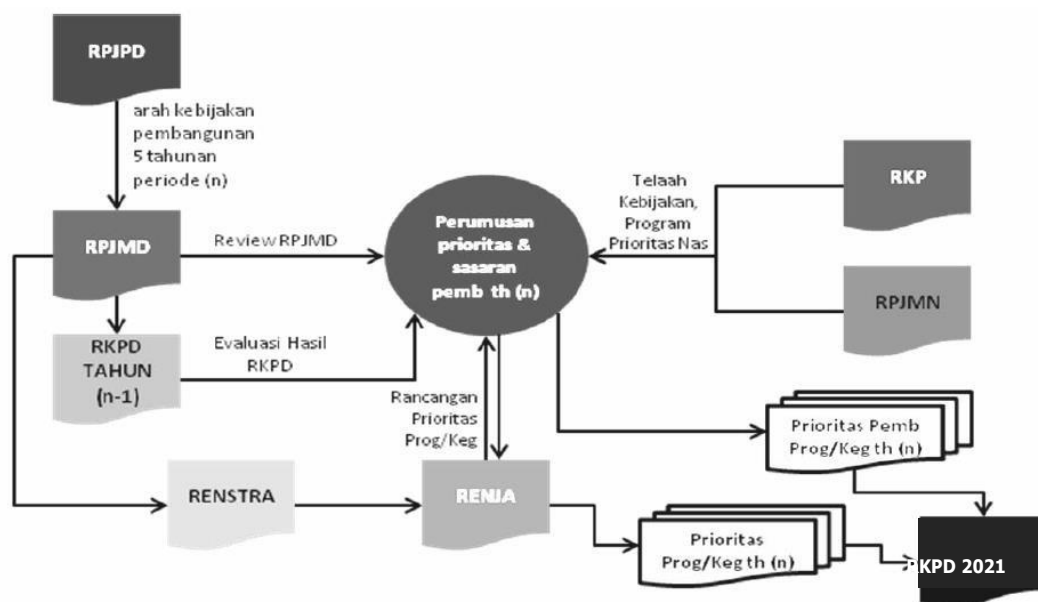
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan renja PD. Proses penyusunan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1  
Proses Penyusunan Renja

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Renja perangkat daerah juga harus selaras dengan program kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP berpedoman pada RPJMN maupun kebijakan daerah yang tercantum dalam RKP berpedoman pada RPJMD. Secara ringkas alur perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2

### Alur Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Sejalan dengan Visi Lembaga Administrasi Negara (**LAN RI**) untuk Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan Administrasi Negara dan Misi yaitu untuk Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Tugas pokok dan fungsi BPSDMD dalam pengembangan kompetensi aparatur terkait dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengusung visi “Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi”, dengan misi : 1) Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; 2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif; 3) Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien; 4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi. Visi dan misi ini mendukung prioritas nasional terkait Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi dengan Program unggulan Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Terlaksananya Kebijakan Birokrasi Efektif dan Efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi. Hal ini juga selaras dengan **misi ke 2 RPJMD Jawa Tengah Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota**, dengan tujuan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Peraturan Pemerintah);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Th. 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Th. 2019 ttg Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Th. 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Th. 2020 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA. 2021
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pela
23. ksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
25. Peraturan Gubernur Jateng No. 23 Th. 2020 tentang RKPD Prov. Jateng Th. 2021;
26. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 050/0000549 tanggal 15 Januari 2020 ttg Arahan Kebijakan & Prioritas Pembangunan Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Prov. Jateng Th. 2021.

### 1.3 Maksud dan Tujuan.

Kedudukan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan program tahunan memberikan arah kebijakan serta pelaksanaan program BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meliputi peningkatan kompetensi aparatur yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Adapun tujuan Penyusunan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2021, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 mengacu ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu terdiri dari :

### Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

### Masyarakat Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Bab V. PENUTUP



BAB II  
HASIL EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memasuki era pembangunan lima tahun ketiga RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, Visi, Misi serta Program Unggulan Pembangunan Jawa Tengah 2018-2023, sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu :

VISI :

JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA”

“Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

MISI :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperkuat sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas Ekonomi Rakyat dan membuk lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

PROGRAM KERJA

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota, sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM penguatan BUMDes dan pelatihan start-up untuk wirausahawan muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi dan misi Gubernur, terutama pada Misi ke-2 : 2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperkuat sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota”.

Untuk mewujudkan visi tersebut pada Tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu urusan kepegawaian dan diklat.

dengan 5 (lima) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kompetensi ASN, dengan kegiatan :
  - Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
  - Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
  - Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
  - Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
  - Kegiatan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
  - Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
  - Pelatihan Dasar CPNS
  - Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
  - Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas
  - Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator
  - Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- b. Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi, dengan kegiatan :
  - Perencanaan Pengembangan Kompetensi
  - Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi
- c. Sertifikasi Kompetensi ASN, dengan kegiatan:
  - Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi
  - Kegiatan Uji Kompetensi
- d. Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, dengan kegiatan :
  - Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
  - Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
  - Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
  - Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
  - Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
  - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
- e. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan kegiatan
  - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Juli Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja %
<i>Meningkatnya kompetensi ASN</i>	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	15 %	14,11 %
<i>Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN</i>	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	35,03 %	35,22 %

Realisasi sasaran 1 : *Meningkatnya kompetensi ASN* s.d bulan juli 13,73% dari target 15%, s.d Tahun 2019 realisasi sebesar 10,79% dan s.d bulan juli ASN Provinsi yang telah lulus pengembangan kompetensi di BPSDMD sebesar 1384 orang. Adapun perhitungan  $1384 \text{ orang} / 41.671 \text{ ASN Prov. Jateng} * 100 = 3,32$ , kemudian ditambah dengan realisasi tahun 2019 menjadi 14,11%.

Realisasi sasaran 2 : *Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN* melebihi dari target dikarenakan Penyebut menggunakan angka Jab. Fungsional di Pemrov. Jateng sebesar 29.310 orang. s.d Tahun 2019 realisasi sebesar 35,22. Pada tahun 2020 dikarenakan Refocusing Anggaran dari target peserta 50 ASN Prov. Jateng Melakukan Uji kompetensi di BPSDMD menjadi 5 orang mengikuti Uji Kompetensi PAK bagi APIP yang diselenggarakan bulan November, sehingga belum bisa dilihat realisasinya.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp 51.459.841.000,- (Belanja Langsung Rp 27.398.681.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp 24.061.160.000,-).

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Juli tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
						Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 Bulan Juli	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	5 dokumen	1	1	1	100,00	40,00	1	2,00	40,00
			Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	180 OPD	36	36	36	100,00	40,00	36	72,00	40,00
			Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	235 dokumen	47	47	47	100,00	23,40	8	55,00	23,40
			Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	29 Orang	6	8	7	87,50	24,14	53	7,00	24,14
		Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi										
			Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	300 dokumen	4	60	60	100,00	20,00	29	60,00	20,00
			Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	5 dokumen	1	1	1	100,00	20,00	1	1,00	20,00
			Jumlah pelatihan yang diakreditasi	5 jenis	1	1	1	100,00	20,00	2	1,00	20,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
						Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 Bulan Juli	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	10 dokumen	3	2	2	100,00	20,00	1	2,00	20,00
			Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	910 Angkatan	253	182	182	100,00	23,63	33	215,00	23,63
		Pengembangan Kompetensi ASN										
			Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	100 %	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
			Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	100 %	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
			Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	100 %	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
			Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	100 %	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
		Pengembangan Kompetensi Teknis		6.800,00	1087	1.725	1.419	82,26	29,18	1.165	1984,00	29,18
		Pengembangan Kompetensi Teknis inti	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	orang		469	439	93,60		135	504,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
						Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 Bulan Juli	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengembangan Kompetensi Teknis pilihan	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	orang		455	341	74,95		180	371,00	
		Pengembangan Kompetensi Teknis umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	orang		801	639	79,78		850	1109,00	
		Pengembangan Kompetensi Manajerial		3.400,00	420	760	741	97,50	21,79	229	741,00	21,79
		Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	orang		360	360	100,00		42	360,00	
		Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	orang		200	197	98,50		47	197,00	
		Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	orang		120	104	86,67		60	104,00	
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kader Potensial	Jumlah Peserta Pelatihan Manajerial Kader Potensial	orang		80	80	100,00		80	80,00	
		Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	11.082,00 orang	1874	7625	7625	100,00	78,84	1.112	8737,00	78,84

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
						Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 Bulan Juli	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pemda	1.090,00 orang	120	150	1.740,00	1160,00	159,63	30	1740,00	159,63
		Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional		4.191,00	655	740	747	100,95	19,49	105	817,00	19,49
		Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	orang		380	420	110,53		70	490,00	
		Kegiatan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pelatihan penjurangan jabatan fungsional	orang		210	177	84,29		30	207,00	
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	Jumlah peserta pelatihan kompetensi teknis jabatan fungsional	orang		150	150	100,00		35	150,00	
	Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN		Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	35,05 %	35	35,01	35,22	100,60	100,49	35,24	35,22	100,49
		Sertifikasi Kompetensi ASN										
			Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	90 %	90	90	82,57	91,74	91,74	80	82,57	91,74
		Kegiatan Uji Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	900 orang	245	250	250	100,00	31,11	90	280,00	31,11

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
						Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 Bulan Juli	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi										
			Jumlah Kualifikasi Aessor kompetensi yang dimiliki	19 jenis	0	3	3	100,00	15,79	0	3,00	15,79
			Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	10 jenis	0	2	5	250,00	60,00	1	6,00	60,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	81,5 Nilai	76	78	78,13	100,17	95,87	81,5	78,13	95,87
		Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
		Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah		15 dokumen	3	3	3	100,00	20,00	3	3,00	20,00
		Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah		60 bulan	12	12	12	100,00	33,33	12	20,00	33,33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
						Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 Bulan Juli	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah		60 bulan	12	12	12	100,00	33,33	12	20,00	33,33
		Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah		60 bulan	12	12	12	100,00	33,33	12	20,00	33,33
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah		60 bulan	12	12	12	100,00	33,33	12	20,00	33,33
		Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah		60 bulan	12	12	12	100,00	33,33	12	20,00	33,33
		Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah		60 bulan	12	12	12	100,00	33,33	12	20,00	33,33
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah		60 bulan	12	12	12	100,00	33,33	12	20,00	33,33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
						Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 Bulan Juli	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah		60 bulan	12	12	12	100,00	33,33	12	20,00	33,33
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah		60 bulan	12	12	12	100,00	33,33	12	20,00	33,33
		Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor		5.094,00 unit	0	696	696	100,00	17,00	170	866,00	17,00
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas		1.310,00 unit	0	262	262	100,00	20,00	0	262,00	20,00
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal		838 Orang	130	159	159	100,00	21,48	21	180,00	21,48
		Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah		20 dokumen	0	4	4	100,00	20,00	1	4,00	20,00
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP BPSDMD	72,8 Nilai	70	72	76	105,56	104,40	78	76,00	104,40

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
						Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 Bulan Juli	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100 %	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		40 dokumen	0	10	10	100,00	37,50	10	15,00	37,50
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		105 dokumen	0	21	21	100,00	28,57	21	30,00	28,57

Realisasi sampai dengan juli tahun 2020 persentase kelulusan Program pengembangan kompetensi ASN, Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar CPNS mencapai 100% dan Prosentase Kelulusan Sertifikasi Kompetensi 0% dikarenakan Kelulusan berdasarkan kemampuan personal. Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti untuk Renja 2021 sebesar 77% dan Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan sebesar 3,5%

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra OPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang semakin memeperkuat pelaksanaan dan organisasi pengembang kompetensi SDM Aparatur;
- b. Peraturan Pemerintah 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP- Pemda) Provinsi Jawa Tengah,;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Guna Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Tengah;
- d. Mengintensifkan kinerja Komite Penjamin Mutu Diklat yang anggotanya adalah para pakar di bidangnya dari Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peningkatan kualitas tenaga widyaiswara, melalui berbagai kegiatan Training of Facilitator (TOF) untuk pengembangan Widyaiswara;
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk proses belajar-mengajar.
- g. Pandemi Covid-19 mengubah/melatarbelakangi perubahan pola diklat yg semula tatap muka klasikal menjadi distance learning/e-learning sekaligus juga menyesuaikan dengan kebijakan pusat untuk penyederhanaan biokrasi yang berkonsekuensi terhadap kebutuhan menyelenggarakan pola diklat jabatan fungsional dlm rangka penyetaraan jabatan administrasi.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah menjalankan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Diklat, sebagaimana diatur dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Th. 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 20. Peraturan Daerah Prov. Jateng No. 5 Th. 2019 ttg RPJMD Prov. Jateng Th. 2018-2023, yaitu : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan : Urusan Kepegawaian Dan Diklat

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menjalankan 3 (tiga) program utama yang menjadi bagian dari program-program prioritas pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Program Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi;
2. Program Pengembangan Kompetensi ASN; dan
3. Program Sertifikasi Kompetensi ASN.

Adapun untuk menunjang pelaksanaan urusan sesuai tugas dan fungsinya, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan 3 (tiga) program penunjang yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang merupakan program-program ex-BAU.

BPSDMD Prov. Jateng telah mengkaji semua pendekatan percepatan peningkatan kompetensi ASN termasuk CorpU. Mendasarkan pada berbagai pertimbangan dan kesadaran bahwa peningkatan kompetensi ASN merupakan tugas tanggung jawab bersama maka CorpU menjadi pilihan. Perumusan CorpU di Provinsi Jawa Tengah yang disepakati disebut sebagai Jateng Corporate University atau disingkat JATENG CU. Pengertian JATENG CU yaitu Model dan strategi pengembangan kompetensi secara terintegrasi selaras dengan kebutuhan organisasi. Pemahaman tersebut mengandung maksud bahwa untuk mengembangkan kompetensi inti semua ASN di Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara gayeng dengan mengintegrasikan serta melibatkan kementerian, lembaga, instansi, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mitra utama pengembangan kompetensi.

Model dan strategi yang diwadahi dalam JATENG CU ini diharapkan dapat menjadi panduan step by step bagi semua instansi utamanya BPSDMD Prov. Jateng dalam mengidentifikasi kompetensi inti, merencanakan, melaksanakan pengembangan kompetensi dan mengevaluasinya. Dalam setiap proses tersebut pemanfaatan akan lebih di prioritaskan untuk membangun program pengembangan kompetensi yang berbasis teknologi informasi yang terkini.

Agenda JATENG CU akan dapat memperkuat pencapaian target daerah dengan memberikan arah yang jelas bagi semua elemen dalam mendorong peningkatan kapasitas kinerja individu, kinerja organisasi dalam melayani masyarakat selaku end user. Dengan proses manajemen pengembangan kompetensi yang tepat dan berorientasi pada kebutuhan inti yang perlu dikembangkan maka keyakinan “jateng pintar bareng” dapat terwujud.

Adapun Agenda JATENG-CU dengan Tahapan Milestone sebagai berikut :

#### JANGKA PENDEK

- Membangun Komitmen dan Penguatan Jejaring pengembangan kompetensi
- Memperkuat sistem informasi dan otomatisasi
- Identifikasi Kebutuhan Inti Organisasi melalui Si Jari On AKD
- Penyelarasan Manajemen Widyaiswara.
- Standarisasi manajemen mutu

- Akreditasi Pelatihan Teknis dan Fungsional
- Menyebarkan “virus inovasi” melalui pameran inovasi kepemimpinan
- Pengembangan Profesi WI melalui seminar nasional dan orasi ilmiah, penyusunan modul dan kurikulum
- Penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi ( LSP)
- Standarisasi Sumber Daya Pelatihan
- Integrasi Database Simdiklat dan Simpeg
- Pengembangan Kompetensi tepat guna melalui jalur klasikal maupun non klasikal.

#### JANGKA MENENGAH

- Merancang pembelajaran online melalui E-Learning;
- Budaya Belajar Mengajar bagi ASN
- Penyelesaian Target RPJMD
- Regulasi J-CU
- Pengembangan berkelanjutan untuk widyaiswara
- Finger Print Kelas
- Pengembangan Kompetensi TOF, MOT
- Resertifikasi ISO
- Akreditasi Diklat Teknis – Diklat Fungsional
- Penyusunan Pedoman Varian Pengembangan Kompetensi

#### JANGKA PANJANG

- Semua jenis Pengembangan Kompetensi terakreditasi
- Integrasi Pengembangan Kompetensi & Sertifikasi kompetensi
- Optimalisasi IT
- Pengembangan E-learning
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pengajar
- Penguatan Peran Stakeholder
- Optimalisasi Hak Pengembangan Kompetensi AS
- Tindak lanjut penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi ( LSP)

Implementasi JATENG-CU sebagian besar masih dalam Jangka Pendek dan Jangka Menengah serta beberapa tahapan sesuai kondisi Pandemic loncat di Jangka Panjang.

Adapun Capaian masing-masing indikator program-program prioritas sebagaimana penjelasan berikut :

- a. Persentase kelulusan Program pengembangan kompetensi ASN, Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar CPNS mencapai 100% (orang)
- b. Prosentase Kelulusan Sertifikasi Kompetensi 0% dikarenakan Kelulusan pada Uji Kompetensi PBJ Tingkat Dasar bagi Akpol (30 org) berdasarkan kemampuan personal
- c. Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti untuk Renja 2021 sebesar 77% dan Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan sebesar 3,5%

Prestasi yang telah diterima BPSDMD di Tahun 2019 -2020 antara lain :

- Peringkat 1 – Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi – LAN RI : “Learning Center For The Fourth Industrial Revolution”, untuk kategori Lembaga Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019



- Peringkat 1 – Badan Publik Informatif Terbaik – Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah : “Keterbukaan Informasi Publik” Tahun 2019



- Akreditasi C – dalam Penyelenggaraan Pelatihan Pendampingan Sertifikasi Organik Tanaman Pangan – Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian RI (masa berlaku 2 tahun) tahun 2019



- Peringkat 1 – Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi – LAN RI : “Agile Learning Centre For Agile Governance”, untuk kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Terakreditasi Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS.



Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/'08)	Target Renstra PD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)		(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1.	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	70 %	76 %	77 %	Indikator Renstra BPSDMD 2018-2023
2.	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	-	-	-	-	-	Skala 3,5	Skala 3,5	Skala 3,5	
3.	Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	
4.	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	
5.	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Fungsional	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	
6.	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	
7.	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	-	-	-	-	-	100 %	100 %	0 %	

Dalam pencapaian BPSDMD telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja BPSDMD yang baik.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu urusan kepegawaian dan diklat. Sesuai dengan urusan yang diampu tersebut hal yang menjadi prioritas adalah tentang pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Hal ini sejalan juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Dan untuk mengukur kompetensi ASN diperlukan uji kompetensi untuk memperoleh informasi tentang kompetensi ASN yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga berkoordinasi dengan Kab/Kota untuk menyamakan persepsi dan prioritas pengembangan kompetensi melalui Analisa Kebutuhan Pelatihan yang menjangkau sampai dengan Kab/Kota serta Sinkronisasi Program sebelum menetapkan jenis-jenis pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih ada beberapa permasalahan dan hambatan yang perlu dihadapi diantaranya:

- 1) Pola karier PNS belum didukung dengan pengembangan kompetensi yang memadai;
- 2) Belum semua ASN kompeten dalam menjalankan tugas jabatan.
- 3) Peralihan Metode yang semula Klasikal menjadi Metode Distance Learning, karena memerlukan Sarana Prasarana yang Mendukung Pembelajaran E-Learning.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3  
 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
 Provinsi Jawa Tengah

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	<b>Administrasi Umum</b>				<b>41.817.285.000</b>					<b>16.516.059.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 bulan	81.110.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 bulan	17.750.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah	12 bulan	2.388.879.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik Perangkat Daerah	12 bulan	1.766.781.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	2.201.876.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	1.029.616.000
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 bulan	235.950.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 bulan	195.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	11.790.400.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	6.019.906.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	3.264.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	2.261.280.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	208.137.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	150.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	172.233.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	130.971.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	420.318.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 bulan	145.095.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semarang	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah dan Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	12 bulan dan 4 dok	1.079.976.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semarang	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah dan Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	12 bulan dan 4 dok	366.930.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 bulan	266.200.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 bulan	70.500.000
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	1.066.250.000	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan	400.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Semarang	Jumlah Kendaraan Unit Dinas/Operasional yang Diadakan	3 unit	1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Semarang	Jumlah Kendaraan Unit Dinas/Operasional yang Diadakan		-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Semarang	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	793 unit	5.913.563.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Semarang	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	88 unit	1.174.956.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpebuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 bulan	4.602.968.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpebuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 bulan	1.522.358.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Semarang	Jumlah bulan terpebuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 bulan	2.325.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Semarang	Jumlah bulan terpebuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	12 bulan	319.640.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Semarang	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 bulan	1.800.425.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Semarang	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 bulan	945.276.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Semarang	Jumlah Unit Gedung yang Direhab	1 unit	3.000.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Semarang	Jumlah Unit Gedung yang Direhab		-
	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>585.860.000</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>517.819.000</b>
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Semarang	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	10 dok	258.610.000	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Semarang	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	10 dok	206.169.000
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 dok	327.250.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 dok	311.650.000
	<b>Administrasi Keuangan</b>				<b>34.245.440.000</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>				<b>30.444.140.000</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	1 dok	34.175.440.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	1 dok	30.374.140.000
	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	1 dok	10.000.000	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	1 dok	10.000.000
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	1 dok	60.000.000	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	1 dok	60.000.000
	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>859.168.000</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>150.000.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Semarang	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	262 unit	146.720.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Semarang	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan		-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Semarang	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	170 org	712.448.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Semarang	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	35 org	150.000.000
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>				<b>10.141.039.000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>				<b>3.264.402.000</b>

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Semarang	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum, inti, pilihan	Teknis inti 535 org, Teknis umum 520, Teknis pilihan 600	10.141.039.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Semarang	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum, inti, pilihan	Teknis inti 365 org, Teknis umum 1050, Teknis pilihan 380	3.264.402.000
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Semarang				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Semarang			-
	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>				<b>45.763.728.000</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>				14.435.503.000
	<b>Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional</b>				<b>6.116.400.000</b>	<b>Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional</b>				<b>2.100.750.000</b>
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Semarang	Jumlah peserta pelatihan pembentukan, penjenjangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Pembentukan Jabfung 60 org, Penjenjangan Jabfung 90, Pengembangan Teknis Jabfung 255	6.116.400.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Semarang	Jumlah peserta pelatihan pembentukan, penjenjangan kompetensi teknis jabatan fungsional	Pembentukan Jabfung 60 org, Penjenjangan Jabfung 90, Pengembangan Teknis Jabfung 255	2.100.750.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	<b>Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial</b>				<b>37.238.960.000</b>	<b>Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial</b>				11.045.440.000
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Semarang	Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS, PKP, PKA, PKN, Pimda, LGLT	Latsar CPNS 3160, PKP 200 org, PKA 160 org, PKN 120 org, Pimda 1625 org	37.238.960.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Semarang	Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS, PKP, PKA, PKN, Pimda, LGLT	Latsar CPNS 800, PKP 120 org, PKA 120 org, PKN 120 org, LGLT 160 org, Pimda 280 org	11.087.440000
	<b>Bidang Sertifikasi dan Penjaminan Mutu</b>				<b>2.408.368.000</b>	<b>Bidang Sertifikasi dan Penjaminan Mutu</b>				<b>1.339.313.000</b>
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Semarang	Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan, Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	1 Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan, 36 OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	87.747.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Semarang	Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan, Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	1 Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan, 36 OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	11.693.000
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Semarang	Jumlah Kualifikasi Asektor kompetensi yang dimiliki, Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	4 Kualifikasi Asektor kompetensi yang dimiliki, 2 Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	140.727.000	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Semarang	Jumlah Kualifikasi Asektor kompetensi yang dimiliki, Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	4 Kualifikasi Asektor kompetensi yang dimiliki, 2 Skema Sertifikasi yang dilaksanakan	74.980.000
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semarang	ASN yang mengikuti uji kompetensi	150 ASN yang mengikuti uji kompetensi	503.723.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semarang	ASN yang mengikuti uji kompetensi	150 ASN yang mengikuti uji kompetensi	409.026.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Semarang	Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu, Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya, Jumlah Pelatihan yang diakreditasi	1 dokumen pemeliharaan standar mutu, 5 Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya, 1 Pelatihan yang diakreditasi	796.166.000	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Semarang	Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu, Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya, Jumlah Pelatihan yang diakreditasi	1 dokumen pemeliharaan standar mutu, 5 Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya, 1 Pelatihan yang diakreditasi	503.597.000
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Semarang	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan, Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	47 perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan, 2 Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	328.110.000	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Semarang	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan, Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	47 perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan, 2 Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	237.264.000
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Semarang	Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan, Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	60 dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan, 182 pengembangan kompetensi yang dievaluasi	551.895.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Semarang	Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan, Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	60 dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan, 182 pengembangan kompetensi yang dievaluasi	102.753.000
	<b>Total</b>				<b>133.412.520.000</b>					<b>65.419.923.000</b>

Dalam Tabel 2.3. Proyeksi Pendapatan Sebesar 7.310.825.000. Tabel 2.3. dapat digambarkan bahwa kebutuhan yang diajukan dalam Renja sebesar Rp. 133.412.520.000 sedangkan pagu indikatif Tahun 2020 dalam Renstra BPSDMD Rp. 65.419.923.000 terdapat selisih Rp (67.992.597.000) dikarenakan pelaksanaan Pelatihan yang semula klasikal dirubah dengan metode distance learning (Blended, Full Learning dll).

## 2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	-	-	-	-

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, beberapa identifikasi permasalahan / tantangan yang muncul di BPSDMD antara lain :

- Perencanaan pengembangan kompetensi ASN belum sepenuhnya berdasarkan AKPK
- Pengembangan kompetensi belum bisa menjangkau seluruh ASN
- Perangkat / Sistem pembelajaran belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi.

Guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 adalah : “ **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR** ” yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa strategi menjawab tantangan, antara lain :

- Memaksimalkan anggaran yang ada dalam pengembangan sistem AKPK dan perlunya standart kompetensi sebagai dasar analisa kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.
- Mengingat selama ini pengembangan kompetensi dengan sistem klasikal, maka dengan mengubah sistem pembelajaran dengan e-learning dan dukungan sarana prasarana berbasis TI semua ASN dapat mengembangkan kompetensinya.
- Sinkronisasi antara penyusunan modul dengan hasil AKPK serta modul dan bahan ajar yang mendukung pelaksanaan sistem pembelajaran e-learning.

Visi pembangunan nasional harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai, antara lain dengan :

- a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai -nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
- c. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- d. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan ; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka ragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
- e. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan kemakmuran serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
- f. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-3, RPJMN ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri termasuk di zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI ; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

Proses perencanaan kegiatan yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan hasil analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) sebagai berikut :

<b>Strength</b>	<b>weakness</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- BPSDMD Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Lembaga Pelatihan Pemerintah terbaik yang dibuktikan dengan prestasi yang diarah, salah satunya adalah meraih 4 (empat) kali penghargaan dari LAN RI sejak tahun 2017, dengan predikat “Lembaga Pelatihan Pemerintah Terbaik dalam kategori Lembaga Pemerintah Daerah Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS”.</li> <li>- BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga tersertifikasi ISO 9001:2015 sebagai bukti terhadap pemeliharaan standar mutu pelayanan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi, dimana pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.</li> <li>- Selain itu, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga memiliki fasilitas yang memadai sebagai penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kompetensi baik secara classical maupun e-learning seperti yang diterapkan di era sekarang sebagai salah satu bentuk upaya dan inovasi pelatihan dalam kondisi pandemi Covid-19. Fasilitas pendidikan berupa asrama,</li> </ul>	<p>Kelemahan (weakness) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berasal dari beberapa faktor, diantaranya adalah masih rendahnya rata-rata pegawai mendapatkan pengembangan kompetensi. Maksud dari “rendahnya rata-rata pegawai” disini terkait dengan pengiriman peserta pelatihan oleh stakeholders yang seringkali mengirimkan peserta yang sama untuk beberapa pelatihan. Hal ini tergantung dari komitmen pimpinan di masing-masing stakeholders atas penugasan yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti kegiatan pelatihan dimaksud.</p>

<p>aula, ruang kelas, laboratorium komputer dan bahasa, perpustakaan, serta fasilitas olahraga tersedia bagi peserta pelatihan. Semua fasilitas yang ada dilakukan pemeliharaan secara rutin sebagai salah satu upaya penjaminan mutu pelayanan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Opportunity</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hal yang menjadi peluang bagi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah adalah lingkup kewenangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Provinsi Jawa Tengah yang telah dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk seluruh jabatan fungsional.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Threat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di era sekarang, beberapa lembaga sejenis (baik negeri maupun swasta) yang dapat melaksanakan pelatihan secara mandiri. Hal ini tentunya menjadi salah satu ancaman (<i>threat</i>) bagi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dimana kompetisi atau persaingan akan semakin berat dengan adanya hal tersebut.</li> <li>- Selain hal tersebut diatas, salah satu hal yang menjadi ancaman (<i>thread</i>) bagi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah terjadinya ketidaksesuaian perencanaan pengembangan kompetensi dengan perencanaan penganggaran dari <i>stakeholders</i></li> <li>- Adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional dan motivasi ASN untuk melaksanakan Pengembangan Kompetensi juga merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi ancaman bagi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>

Sesuai dengan Dokumen Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 dan memperhatikan hasil dari analisis SWOT diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah : **“Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan”**, dengan indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :
  - a. Meningkatnya kompetensi ASN dengan indikator Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
  - b. Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN dengan indikator Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi.

Pada tahun 2021 target tujuan yang ingin dicapai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yaitu Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar yaitu 89,29 %. Target sasaran tersebut dapat dicapai melalui target masing-masing tujuan :

- 1) Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya adalah 20 %;
- 2) Persentase ASN yang tersertifikasi sebesar 36,79 %.

Tabel 3.2.  
Tujuan dan Sasaran  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Sat	2021
1	Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan		Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	89,29
		1. Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase ASN ditingkatkan kompetensinya	%	20
		2. Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	36,79
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	80
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai	80
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai	72.6

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPSDMD, maka harus direncanakan program maupun kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut. Pada Tahun 2021 direncanakan 1 (satu) program prioritas dengan 2 (dua) kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :
  - a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.
  - b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi manajerial dan Fungsional.

Program dan kegiatan prioritas tersebut didukung oleh program dan kegiatan pendukung (ex-BAU) berupa 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan. Program dan kegiatan prioritas maupun pendukung secara rinci sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1  
Rumusan Program dan Kegiatan PD Tahun 2021  
dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
Provinsi Jawa Tengah

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja									Pagu Indikatif	Prakiraan Maju		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Unit Kerja			
					Capaian Program						Keluaran		Hasil		Tahun 2021	Tahun 2022					
					Uraian	Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				Rp.	Target	Rp. (000)
						Satuan	Volume		Satuan	Volume											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>													<b>65.419.923.000</b>		<b>113.735.969</b>					
5.04.02	<b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>													<b>17.791.905.000</b>		<b>37.215.907</b>		<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>			
5.04.02.1.01	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>											<b>Presentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis</b>	<b>100.00.%</b>	<b>3.264.402.000</b>	<b>100.00.%</b>	<b>9.114.651</b>		<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>			
02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									Jumlah peserta pengembangan teknis umum	1.050 orang			1.096.526.000	576 orang	3.442.415	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum			
										Jumlah peserta pengembangan teknis inti	365 orang			1.132.453.000	417 orang	3.473.605	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti			

									Jumlah peserta pengembangan teknis pilihan	80 orang			1.035.423.000	382 orang	2.041.131	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
02.1.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								Jumlah peserta pengembangan teknis umum	1.050 orang			0	576 orang	66.500	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
									Jumlah peserta pengembangan teknis inti	365 orang			0	382 orang	49.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
									Jumlah peserta pengembangan teknis pilihan	380 orang			0	382 orang	42.000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum

5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional												16.516.059.000		28.101.256		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.								Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	60 orang			396.300.000	457 orang	3.355.099	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
									Jumlah peserta pelatihan penjurangan jabatan fungsional	90 orang			564.524.000	240 orang	2.218.048	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Sub Bidang Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional
									Jumlah peserta pengembangan kompetensi jabatan fungsional	255 orang			1.139.926.000	180 orang	1.629.426	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
									Jumlah peserta pelatihan dasar CPNS	800 orang			3.926.780.000	80 orang	1.170.589	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Prajabatan
									Jumlah peserta pelatihan struktural pimpinan tinggi pratama	120 orang			2.836.450.000	120 orang	3.202.620	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator
									Jumlah peserta pelatihan struktural jabatan administrator	120 orang			1.909.630.000	200 orang	3.437.400	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator
									Jumlah peserta pelatihan struktural jabatan pengawas	120 orang			1.807.180.000	280 orang	6.719.762	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Prajabatan

									Jumlah peserta pengembangan kompetensi pemda	280 orang			408.520.000	230 orang	2.960.321	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah
									Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial	160 orang			198.880.000	80 orang	236.192	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Prajabatan
02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional								Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	1 dokumen			3.693.000	1 dokumen	30.982	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
									Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisis pengembangan kompetensi	36 OPD/Kab/Kota			8.000.000	36 OPD/Kab/Kota	169.834	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi								Jumlah kualifikasi asesor yang dimiliki	4 orang			64.280.000	4 orang	116.814	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
									Jumlah skema sertifikasi yang dilaksanakan	2 skema			10.700.000	2 skema	56.366	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	

02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota								Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	150 orang			409.026.000	150 orang	533.571	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar								Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	1 dokumen			53.624.000	1 dokumen	185.142	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
									Jumlah tenaga pengembang kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya	7 orang			178.727.000	4 orang	343.782	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
									Jumlah pelatihan yang diakreditasi	3 dokumen			271.246.000	1 dokumen	122.452	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional								Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	52 dokumen			231.369.000	47 dokumen	559.280	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
									Jumlah pedoman teknis pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	1 dokumen			5.895.000	2 dokumen	94.501	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan								Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	57 dokumen			33.545.000	60 dokumen	487.279	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
									Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	88 dokumen			69.208.000	137 dokumen	471.796	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												<b>47.433.213.000</b>		<b>96.520.062</b>		<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>
<b>X.XX.01.1.01</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												<b>517.819.000</b>		<b>1.122.314</b>	<b>Sekretariat</b>	
01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan								Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen			206.169.000	10 dokumen	752.197	Sekretariat	Sub Bagian Program
01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah								Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 dokumen			311.650.000	21 dokumen	370.117	Sekretariat	Sub Bagian Program
<b>X.XX.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>												<b>30.444.140.000</b>		<b>37.345.440</b>	<b>Sekretariat</b>	
01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN								Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 dokumen			30.374.140.000	1 dokumen	37.193.000	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan

01.1.02.03	Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi									Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 dokumen			10.000.000	1 dokumen	37.330	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan
01.1.02.04	Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan									Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 dokumen			60.000.000	1 dokumen	115.110	Sekretariat	Sub Bagian Keuangan
<b>X.XX.01.1.03</b>	<b>Administrasi Umum</b>													<b>16.516.059.000</b>		<b>57.130.519</b>	<b>Sekretariat</b>	
01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah	12 bulan			17.750.000	12 bulan	89.221	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik									Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah	12 bulan			1.766.781.000	12 bulan	2.388.879	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah	12 bulan			1.029.616.000	12 bulan	2.201.876	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 bulan			195.000.000	12 bulan	259.545	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan									Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah	12 bulan			6.019.906.000	12 bulan	11.430.400	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor									Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah	12 bulan			2.261.280.000	12 bulan	3.624.000	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor								Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah	12 bulan			150.000.000	12 bulan	208.137	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah	12 bulan			130.971.000	12 bulan	172.233	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah	12 bulan			145.095.000	12 bulan	420.318	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	4 dokumen			332.300.000	4 dokumen	1.094.406	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
									Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah	12 bulan			34.630.000	12 bulan	93.569	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman								Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah	12 bulan			70.500.000	12 bulan	292.820	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah								Jumlah bulan terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bulan			400.000.000	12 bulan	1.066.250	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional								Jumlah kendaraan unit dinas/operasional yang diadakan	0 unit			0	1 unit	1.500.000	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor								Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	88 unit			1.174.956.000	1.405 unit	7.687.632	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

01.1.03.2 9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor								Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah	12 bulan			1.522.358.000	12 bulan	7.050.000	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.3 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung	12 bulan			319.640.000	12 bulan	570.765	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.3 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor								Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah	12 bulan			945.276.000	12 bulan	1.980.468	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.03.3 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor								Jumlah unit/gedung yang direhab	0 unit			0	1 unit	15.000.000	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
<b>X.XX.01. 1.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>												<b>150.000.000</b>		<b>921.789</b>	<b>Sekretariat</b>	
01.1.04.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya								Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	0 unit			0	262 unit	138.096	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
01.1.04.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Formal								Jumlah ASN yang mengikuti diklat/workshop/bintek/seminar	35 orang			150.000.000	175 orang	783.693	Sekretariat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
<b>Total</b>													<b>65.419.923.000</b>		<b>113.735.969</b>		

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Proses penyusunan RKPD Tahun 2021 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2021. Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati BPSDMD Provinsi Jawa Tengah serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di tahun-tahun mendatang mendapat tantangan sebagai akibat dari adanya pergeseran zaman dan juga Revolusi Industri 4.0, dimana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk melakukan perubahan pola penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pola *classical* menjadi pola pelatihan jarak jauh atau *distance learning*. Perubahan yang terjadi ini juga nantinya akan mempengaruhi penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang digunakan sebagai bentuk fasilitasi terhadap penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Selain perubahan pola pelatihan seperti tersebut diatas, hal lain yang perlu menjadi perhatian BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di tahun mendatang adalah memastikan terlaksananya Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi. Dalam hal ini, Sertifikasi Kompetensi akan berperan sebagai penguatan Pengembangan Kompetensi, sehingga ASN yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi sebagai bukti kompetensi terhadap Pengembangan Kompetensi yang diikuti.

Mengingat di tahun-tahun mendatang akan terjadi banyak perubahan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana kerja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680614 199001 1 001